**NOTULENSI**

**DISKUSI PUBLIK**

**MEMBANGUN KEADILAN NYATA MELALUI UKT**

1. **LATAR BELAKANG**

 Status mahasiswa sangat lekat dengan julukan *agent of change* atau agen perubahan. Agen perubahan disini dalam arti mahasiswa sebagai aset bangsa yang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat-sifat unggul ini di antaranya adalah inisiatif, aktif, serta solutif.

 Indonesia merupakan suatu Negara berkembang dengan angka probabilitas kemunculan isu yang masih terbilang tinggi. Keadaan yang demikian sejatinya adalah suatu anugerah bagi mahasiswa, karena dengan berbagai permasalahan tersebut mahasiswa akan semakin banyak belajar untuk aktif berkontribusi menyelesaikan masalah negaranya menuju Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi untuk mencapai kriteria-kriteria unggul agen perubahan dibutuhkan satu sifat utama dalam diri mahasiswa, yakni kepedulian. Berkaca pada realita sekarang, persentase kepedulian masih kurang dibandingkan dengan apatisme pada mahasiswa. Bahkan untuk mahasiswa yang memiliki kepedulian pun masih sangat jarang didapatkan sarana yang efektif untuk menunjang aspirasi mereka.

 Diskusi public adalah salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya didatangkan pihak terkait isu aktual yang tengah ramai dibicarakan di masyarakat umum. Kemudian mahasiswa akan diberi kesempatan untuk hadir serta menyampaikan pandangannya secara langsung dan terbuka. Kegiatan ini diharapkan mampu memfasilitasi mahasiswa yang ingin memperoleh informasi mengenai isu terkait dan secara perlahan membangun pondasi kepedulian serta rasa ingin tahu dalam diri mahasiswa.

 Kementerian Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta memiliki berbagai program kerja lain, salah satunya adalah Diskusi Publik. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memberi wawasan kepada mahasiswa FK UNS mengenai pentingnya menyampaikan pandangan dan memahami seluk beluk yang berkembang di masyarakat. Diharapkan dengan adanya diskusi publik, aspirasi mahasiswa akan tersampaikan. Selain itu mahasiswa FK UNS akan terlatih menjadi sosok agen perubahan dengan saturasi kepedulian tinggi yang dinantikan kehadirannya di masyarakat dan bermanfaat besar bagi kemajuan negara.

1. **PELAKSANAAN**

Diskusi Publik “Membangun Keadilan Nyata Melalui UKT” dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015 di Ruang SP4 Fakultas Kedokteran UNS, dimulai pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh perwakilan BEM dari seluruh Fakultas di UNS, yaitu :

1. BEM UNS
2. BEM Fakultas Kedokteran
3. BEM Fakultas KIP
4. BEM Fakultas Pertanian
5. BEM Fakultas MIPA
6. BEM Fakultas Teknik
7. BEM Fakultas Ilmu
8. BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
9. BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10. BEM Fakultas Hukum.
11. **SESI I**

Sesi I berupa pemaparan hasil kajian BEM FK UNS oleh **Muhammad Fakhri Kusuma Wardani** sbb:

UKT adalah satuan nominal yang dibayarkan setiap mahasiswa ke kampus. Sebelum diberlakukannya UKT, ada uang pangkal yang dirasa memberatkan karena nominalnya terlalu besar di depan meskipun selanjutnya relatif lebih kecil. Memberatkan karena harus membayar uang pangkal sekitar 80-100juta meskipun uang kuliah per semesternya tak begitu mahal. UKT mulai diberlakukan pada tahun 2012 dan mulai efektif tahun 2013.

**Perumusan UKT**: UKT= BKT-BOPTN. BKT (Biaya Kuliah Tunggal) : biaya yang diestimasikan akan dihabiskan oleh mahasiswa selama satu semester. BOPTN adalah BOS (Biaya Operasional Sekolah) versi Universitas. Dimunculkan oleh pemerintah untuk membantu operasional perguruan tinggi.

**UKT di FK UNS** mulai diberlakukan tahun 2012 dan Perguruan Tinggi yang lain memberlakukannya mulai tahun 2013. UKT di UNS menjadi Pilot Project bersamaan dengan UNSOED yang setiap tahun keberjalannya berbeda, yaitu sebagaimana berikut:

1. **Tahun 2012 :** pembagian berdasarkan SNMPTN (6juta) dan Jalur mandiri (22juta).
2. **Tahun 2013 :** SNMPTN (6jt), SBMPTN (15jt), UMB (17jt)
3. **Tahun 2014 :** pembagian berdasarkanpendapatan orangtua, golongan 1-5 (range penggolongan gaji dianggap terlalu kecil sehingga kurang merata pada akhirnya).

**Analisis BKT-BOPTN, UKT**

**Indikator yang memengaruhi BKT antara lain**: capaian standar nasional, standar kemahasiswaan. Prodi yang berbeda dari Universitas yang berbeda BKT-nya pun berbeda. BKT Pendidikan Dokter UNS= 24.179.000, BKT UNDIP= 20.340.483.

**BOPTN** yang diberikan variatif, yang menentukan nominal PNBP (penerimaan negara bukan pajak—riset, pengabdian masyarakat, kerja sama) dan akreditasi. Semakin baik akreditasi maka dana PNBP pun semakin banyak teralokasikan untuk BOPTN. BOPTN UNS 42.202.751.403.

**Akreditasi** diploma 29 (A 4, B 23, C 2) S1

**PNBP UNS** PKM DIPAyang masuk hanya 89 judul dari 1405 (11%).

**Tata kelola UKT di UNS.** UKT mahasiswa dimasukkan ke rekening rektorat, disatukan dengan seluruh UKT mahasiswa UNS, kemudian dibagi berdasarkan proporsi 31:69. 69% diberikan ke fakultas untuk dikelola, 31% diberikan ke rektorat untuk didistribusikan atau dikelola oleh rektorat. Sebagai contoh, Fakultas Kedokteran mendapat 20 milyar, 9 milyar untuk remunerasi. Sisanya hanya 11 milyar yang diberikan kepada fakultas yang sebenarnya masih sangat kurang jika diperuntukkan memenuhi kebutuhan Fakultas Kedokteran. 31% yang masuk ke dalam kas rektorat antara lain digunakan untuk membuat pedestrian sepanjang 1,5 km, pemisahan FSRD dan FIB, KKN, serta pembangunan perpustakaan di belakang auditorium. Menurut For ICU, UNS adalah salah satu perguruan tinggi yang masuk 10 besar di Indonesia. Untuk KKN saja, sebuah program dari rektorat yang menelan banyak biaya sejumlah kurang lebih 2.721.000.000 belum didapatkan transparansi dana.

**Evaluasi UKT**. 88,3% belum berkeadilan, 11.7% sudah adil, jika dilihat dari kuisioner yang telah diisi mahasiswa. 96.3% suara mahasiswa menyatakan sarpras tidak sesuai dengan UKT yang dibayarkan, 3.7% sarpras sesuai dengan UKT. 82.2% UKT yang dibayarkan tidak menunjang kegiatan akademik mereka sementara 79.9% tidak setuju jika UKT yang dibayarkan sudah menunjang kegiatan kemahasiswaan.

**Tujuan awal penerapan UKT** adalah untuk menyesuaikan tanggungan mahasiswa dengan ekonomi keluarga. Sehingga untuk tercapainya tujuan tersebut Universitas harus bisa memaksimalkan BOPTN agar UKT murah. Pengelolaan keuangan yang baik juga diperlukan agar UKT semakin terasa ringan.

**Rekomendasi**.

A. Membuat sistem verfikasi UKT yang lebih baik.

B. Memaksimalkan pendekatan agar BOPTN semakin besar. Menambah persentase dana yang dikembalikan ke fakultas sebagai penunjang remunerasi.

C. Kembali membuka jalur non reguler.

1. **SESI II**

Sesi II adalah pemaparan materi oleh narasumber :

1. **Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI)**

Pada akhirnya kebijakan UKT bergantung pada kultur masing-masing kampus.

Misalnya saja pembiayaan kuliah di kampus UI:

Sebelum 2008: hanya 1.250.000 / semester

Tahun 2008 terdapat BOPB (Biaya Operasional Pembiayaan Berkeadilan). Rumpun IPA 0-7.5juta dan rumpun Sosial 0-5juta. Prof. Gumilar, Rektor UI pada waktu itu, merupakan seorang jebolan jurusan sosiologi berpendapat: yang kaya mensubsidi yang miskin, yang miskin merasakan subsidinya agar yang anak petani disubsidi anak gubernur. Antara mahasiswa dan rektorat sepakat untuk membagi rumpun IPA dan IPS. BOPB adalah hak mahasiswa, setiap mahasiswa berhak meminta BOPB. Namun sistem ini hanya berjalan selama tahun 2008-2009.

Tahun 2010-2014 rektorat tidak menggunakan BOPB lagi, biaya kuliah UI menjadi 7,5 dan 5 juta. Jika ingin turun, harus menggunakan semacam keringanan, namun bukan hak seluruh mahasiswa seperti kesepakatan yang dibuat pada tahun 2008.

Tahun 2015 mahasiswa baru UI bisa menggunakan BOPB lagi. Dasar hukum UKT Pasal 88 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

**MITOS UKT**. Katanya UKT berkeadilan untuk semua mahasiswa yang bertujuan meringankan mahasiswa. Bagaimana sistem pengawalan dan cara menerapkannya, verifikasi, dan lain sebagainya.

Masalah UKT di berbagai kampus:

* Mahasiswa kebingungan mengenai info biaya kuliah.
* Harusnya di website penerimaan mahasiswa baru ditampilkan sejelas-jelasnya.
* Mahasiswa salah masuk golongan ukt 🡪 sumber permasalahan mengapa mahasiswa bentrok dengan rektorat. Mahasiswa seharusnya bisa memilih sejak awal, implikasinya tahun 2015 dari 7000 mahasiswa hanya 24 yang merasa tidak sesuai.
* Jarak antar golongan UKT tidak proporsional.

UI menerapkan angka yang keriting dengan banyak varian tergantung pada kemampuan mahasiswa.

* Persyaratan berkas UKT rumit.

Berkas dibuat layaknya tingkatan, jadi mahasiswa hanya menyetorkan berkas yang sesuai dengan tingkatan ‘paket’ UKT yang diinginkan. Hal ini bukan hanya mempermudah mahasiswa namun juga mempermudah penyeleksian oleh Rektorat.

* Tidak ada sarana peninjauan kembali

Tidak bisa melakukan banding jika salah golongan UKT. Sementara jika orangtua meninggal atau usahanya bangkrut, mahasiswa menjadi tidak bisa mengajukan pindah golongan UKT. Sehingga di UI sarana tersebut diadakan. Mahasiswa bisa mengajukan banding, tiap semester bisa melakukan update BOPB/UKT contohnya seperti kalau orang tua meninggal/bangkrut.

UKT dan BOPB sama saja. Prof. Gumilar pada tahun 2012 (Saat UKT diberlakukan pada semua Uiversitas) mempunyai banyak kasus, indikasinya ada korupsi, digantinya Dirjen Pendidikan Tinggi Joko Santoso. Di UI sudah diterapkan,

Di UI sudah diterapkan, diterapkan di seluruh Indonesia karena dia melihat di UI. Tidak membayar uang praktikum dan pembangunan gedung lagi.

Setiap mahasiswa baru UI akan memilih golongan UKT yang sesuai dengan kondisinya. Golongan yang dipilih berpengaruh pada berkas persyaratan yang harus dikumpulkan ke Rektorat untuk diverivikasi. Mengapa memilih system ini? Karena ingin memastikan:

1. Kemampuannya sudah sesuai, dipilih sendiri dan tidak dijustifikasi rektorat hanya berdasarkan data.
2. Dengana adanya tingkatan persyaratan, berkas di rektorat tidak menumpuk. Implikasi sederhananya tidak akan tercecer dan tercampur. Rektorat sudah terbantu, tidak kebingungan dan jadinya lebih mudah.

Prosedur UKT di UI.

Kalau proposal 🡪 ditentukan rektorat 🡪 banding (dalam golongan yang sama, beda angka, boleh dibanding) 🡪 kuliah I

Pada akhirnya, ukt bisa menjadi subsidi silang mahasiswa, biaya kuliah di Universitas adalah pilihan mahasiswa sendiri. UKT adalah solusi ketika subsidi silang bisa berjalan dengan baik dnegan sistem yang baik.

1. **Radiyan Medhiyanto (Presiden BEM FK UNDIP)**

UKT di UNDIP terdapat polemik, ada 2 anak kembar dan masuk 2 Fakultas berbeda, Si A masuk golongan 1 dan si B masuk golongan 2. Masalahnya adalah tidak adanya patokan yang jelas antar Fakultas.

Keadaan UKT di FK Undip. Yang mendapatkan golongan 1-4 hanya 30% dari jumlah mahasiswa sedangkan golongan 5-7 ada 70% dari jumlah mahasiswa. Karena ada 30% mahasiswa tidak terlalu mampu membayar UKT, maka diadakan Bank Kesejahteraan Mahasiswa. Mahasiswa mengumpulkan dana untuk mahasiswa yang membutuhkan melalui program beasiswa 🡪 per mahasiswa 1 juta rupiah, dengan persyaratan khusus (ekonomi kurang disertai dengan surat keterangan tidak mampu). Diberikan di akhir semester untuk membayar UKT semester depan.

Latar belakang diadakannya Bank Kesma adalah karena UKT yang tinggi, harga makanan relatif tinggi, fotocopy bahan perkuliahan, maupun kejadian tidak terduga lainnya. Adanya Bank Kesma juga dimaksudkan agar tidak adanya mahasiswa yang cuti kuliah hanya karena faktor tersebut. Sistem yang dijalankan, per bulan selama 1 tahun diputarkan amplop kepada para mahasiswa untuk diisi. Masalahnya, Bank Kesma tidak stabil pendapatannya. Jadi tidak semua mahasiswa dapat terangkul dan ada mahasiswa yang segan untuk mendaftar. Cara menanggulangi 🡪 bagaimana caranya agar dekanat memberikan dana untuk Bank Kesma, Tetapi tidak ada kerjasama dari pihak dekanat dan akhirnya Bank Kesma menggunakan Sumber Dana dari Alumni.

1. **Drs. Susanto Tri Hananto, M.Si., Ak. (Staff Ahli Keuangan Rektor Periode 2015/2019)**

Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. UKT = BKT – BOPTN. Setelah kita mengetahui cost unit, berapa yang bisa didanai internal, logikanya kekurangan akan dikurangi pemerintah. Pada kenyataannya, tidak berjalan. Contohnya, UNS membutuhkan dana 350 milyar setahun, tidak tahu mahasiswa bidikmisi berapa, berapa golongan kedua, ketiga dan seterusnya berapa orang, tidak tahu hingga mahasiswa sebenarnya diterima. Misalkan yang diterima hanya 250 milyar, padahal membutuhkan 100 milyar lagi, pemerintah tidak bisa nombokin 100 milyar (UNS mendapatkan 50 milyar tahun ini), tidak bisa menutup kebutuhan UNS. Harusnya dari awal tidak dikeluarkan sistem UKT yang dikurangi BOPTN kalau pemerintah tidak bisa konsisten, soalnya berapa selisihnya tidak bisa diatasi oleh pemerintah semuanya. Di dalam Kementrian dan DPR terdapat perselisihan.

UNS sudah menjadi BLU sejak 27 Februari 2009. Pengelolaan keuangan sesuai Pengelolaan keuangan badan layanan umum, jadi tidak sama seperti milik lembaga pemerintah, ada di tengah-tengah BUMN (yang profit oriented) dan pemerintahan daerah (organ pemerintah).

Sistem akuntansi 🡪 kementrian meminta BLU untuk menyusun perhitungan cost unit (kita ingin suatu hal sebaik apa dan butuh layanan apa saja untuk mewujudkan hal itu, menyusun aktivitas apa saja, dan butuh anggaran berapa) cost unit dihitung per mahasiswa per semester🡪 BKT.

Pada 2012, dibentuk tim pendamping BLU di UNS, dibangun CSA (Cost Structure Analysis). Dibuat secara online dari Universitas-Fakultas-Prodi. Entry akan melayani mahasiswa seperti apa, akhirnya keluar biaya yang dibutuhkan mahasiswa.

Peraturan Menteri Keuangan (pasal 5 ayat 1, pmk 76/pmk.05/2008):

1. Sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan pokok
2. Sistem akuntansi aset tetap

Pasal 9 ayat PMK no 76/PMK/05/2008

Sistem akuntansi baik BLU menghasilkan bahan pokok produksi, membutuhkan biaya berapa untuk satu mahasiswa untuk kuliah dari awal semester sampai akhir semester. Disesuaikan dengan visi misi prodi. Informasi tentang analisis varian (perbedan antara biaya yang dikeluarkan sama biaya yang diberikan Universitas).

Pasal 9 ayat 2:

Sistem akuntansi biaya berguna untuk:

1. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU🡪 sudah ada janji layanan yang akan diberikan untuk lulusan UNS, contohnya lulusan akuntansi ingin bekerja di perusahaan/bank bonafit karena dia milik UNS. Maka, harus ada sarana yang mendukung 🡪 SAP (software Jerman, 100jt per tahun) untuk mengambil mata kuliah- mata kuliah tertentu agar menunjang. Mahasiswa-mahasiswa semester V harus ada ujian sertifikasi teknisi akuntansi. Orang tua diperlihatkan transparansi layanan yang diberikan oleh Universitas ke mahasiswa dan bahkan diberi akses melihat akhs dan presensi anak. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU
3. Penghitungan tarif layanan BLU

Permasalahannya adalah pemerintah tidak mau memberikan beban pada mahasiswa. Padahal sama saja, Universitas juga memberikan beban mahasiswa. Nah, untuk sekarang golongannya sangat jauh. Naiknya antar kolom, yaitu antara golongan 2 ke golongan 3 maupun ke golongan berikutnya kenaikannya sangat drastis sehingga grafiknya tidak terlihat landai, hal ini sudah dikritisi. Sistem UKT yang sekarang juga belum bisa terlalu adil membedakan golongan UKT berdasarkan gaji orang tua. Contohnya mahasiswa dengan gaji orang tua 30 juta mendapatkan golongan UKT yang sama dengan mahasiswa yang gaji orang tuanya 15 juta karena mempunyai range gaji dalam golongan UKT tertinggi. Untuk jalur mandiri, di UNS tidak membedakan biaya pendidkan.

1. **SESI III**

Sesi III adalah sesi diskusi dan tanya jawab mahasiswa dengan para narasumber.

1. Pertanyaan dari Asa (Fakultas Pertanian UNS), “untuk Pak Santoso: Apakah ada solusi untuk masalah UKT angkatan atas karena angkatan atas tidak menggunakan sarana prasarana dan hanya mengerjakan skripsi, tetapi bayarnya tetap? Bagaimana evaluasi untuk tahun depan? Dapatkah mahasiswa baru menghitung UKT-nya sendiri sebelum dia masuk kuliah?”

Tanggapan dari pak Santoso, “Peraturan Rektor yang mengatur tentang dispensasi UKT 🡪 pada saat masa studi normal (S1 4 tahun, diploma 3-4 tahun), karena saat menghittung unit cost, asumsinya semester normal karena akan berpengaruh pada saat menghintung harga pokok produksi tiap mahasiswa. Oleh karena itu, sarana prasarana dihitung pas karena penghitungan biaya produksi juga pas.”

1. **SIMPULAN**
2. Closing statement Bang Andi: terlepas apapun sistemnya, tidak ingin kejadian UKT di UI pada tahun 2009 terulang lagi. Transfer semangat dan ilmu ke mahasiswa angkatan bawah untuk regenerasi, jangan sampai yang mengerti UKT hanya mahasiswa-mahasiswa tertentu dan bukan semuanya
3. Closing statement Mas Radhi: Di dunia ini ada dua pemuda, yaitu pemuda yang menuntut perubahan dan pemuda yang melakukan perubahan. Marilah menjadi pemuda yang melakukan perubahan!
4. Get up, stand up for the right. Get up, stand up and fight.